

**Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia:
Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur
Tahun 2016**

JURNAL



Dosen Pembimbing :

Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Ditulis Oleh:

Nama : Dea Anjani Sari
Nomor Mahasiswa : 16313038
Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017/2018

PENGESAHAN JURNAL

“Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia:
Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur
Tahun 2016”

Nama : Dea Anjani Sari

Nomor Mahasiswa : 16313038

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

**Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia:
Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur
Tahun 2016**

Dea Anjani Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

anjanidea58gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung secara seimbang dan merata. Kecenderungan peranan modal (investor) lebih memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas yang lengkap. Adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah. Kesenjangan pembangunan ekonomi antardaerah dan antarwilayah serta antarsektor ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis besar disparitas pendapatan antar daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2016. Dimana hasil dari penelitian ini bisa untuk mengetahui disparitas yang terjadi di daerah atau antar daerah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, berdasarkan teori serta pendapat para ahli yang sudah bisa diterapkan pada masyarakat. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, dan Standar Deviasi. Dari hasil perhitungan yang diperoleh selama periode pengamatan (2016) di provinsi NAD dan NTT sebagai berikut: rata-rata disparitas pendapatan per kapita di NAD dan NTT dengan menggunakan Indeks Williamson selama periode pengamatan (2016) adalah 0,0693 untuk provinsi NAD, 0,9183 di provinsi NTT. Disparitas pendapatan rata-rata per kapita oleh Indeks Entropi Theil untuk di NAD dan NTT selama periode pengamatan (2016) berturut-turut adalah 1,3759 dan 1,4098. Dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson mengalami disparitas tertinggi di provinsi NTT. Perhitungan menggunakan Indeks Entropi Theil di provinsi NTT juga mengalami disparitasnya tertinggi.

Kata kunci: *Pendapatan Per Kapita, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Ketimpangan Antar Wilayah, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil*

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi mengandung makna pada persoalan kemiskinan dan pemerataan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada serta proses kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja guna menunjang kegiatan ekonomi. Setiap daerah menetapkan tingkatan laju pertumbuhan yang tinggi untuk perencanaan dan tujuan pembangunan di daerahnya. Perekonomian mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan perekonomiannya lebih tinggi dari pada pencapaian sebelumnya. Perihal utama dalam pembangunan daerah adalah daerah tersebut mampu mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, dan menganalisis apakah memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlunya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan merata. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berpengaruh terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Menurut Lincoln Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya memiliki sedikit manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut *trickle down effect* dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas. Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara miskin dan berkembang. Ketimpangan disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Pandangan tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Shankar dan Shah (2008), bahwa ketimpangan antar daerah

merupakan suatu perkembangan yang selalu ada di berbagai negara, terutama bagi negara dengan geografi dan wilayah yurisdiksi yang luas. Hal ini memperjelas bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah merupakan masalah universal, karena pada tingkat apapun kesenjangan selalu ada, dikarenakan oleh perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Kuznet dalam hipotesisnya yang dikenal sebagai hipotesis “U-Terbalik” Kuznet membuktikan hal itu, yaitu dalam analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara maju ditemukan bahwa pada tahap pertumbuhan awal distribusi awal cenderung memburuk, namun dalam tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik (Kuncoro, 2014).

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Saat ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kabupaten yang ada di provinsi NAD terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, di antaranya yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diamati, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya bagaimana proses pembangunan yang terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan pembangunan tersebut kearah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai keunggulan kompetitif di setiap daerah untuk dikembangkan.

Dalam sejarahnya, masyarakat NAD telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat NAD tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Dengan berlandaskan kepada Qanun NAD Nomor 10 tahun 2007 tentang *Baitul Mal* bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab. Kemudian NAD dikenal sebagai *Serambi*

Mekkah karena dari wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada dalam gugusan sunda kecil dan termasuk dalam kepulauan Nusa Tenggara. Saat ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah 21 kabupaten, dan jumlah kota yang ada di NTT adalah 1 kota. Wilayah ini menyimpan berbagai keunggulan untuk diberdayakan misalnya sumber daya alam yang berlimpah yang mana sesungguhnya sangat potensial untuk menjadi kekuatan ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Namun sumber daya manusia yang tersedia di kawasan ini sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menggali potensi yang ada, inilah yang disebut “*kaya tetapi miskin*”, artinya bahwa sumber daya alamnya sangat berpotensi tetapi pengolahannya masih sangat minim atau belum optimal. Adapun beberapa kendala atau indikator yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, yang pertama adalah begitu luasnya kawasan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang sangat rendah, kedua keaneka-ragaman masyarakat dan kultural dengan tingkat penguasaan informasi dan teknologi yang rendah, ketiga rendahnya tingkat pendidikan, melek huruf dan akses atas pendidikan tinggi, keempat adalah tingkat pendapatan per kapita yang masih rendah.

Sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tidaklah dengan sendirinya memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumber daya manusia yang ada tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi guna memanfaatkan sumber alamnya. Sebaliknya, sebuah wilayah yang miskin sumber alam, namun cakap dalam mengembangkan teknologi, ternyata lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah lainnya yang tidak cukup mempunyai sumber daya alam dan manusia yang unggul. Sengaja diambil daerah dengan latar belakang berbeda agar dapat diketahui apakah ada perbedaan distribusi pendapatan antara provinsi NAD dan NTT. Asumsi yang diajukan dalam pengambilan daerah penelitian

yang berbeda adalah bahwa daerah yang Islam (syariat Islam kuat) tidak mengalami ketimpangan atau distribusi merata. Berarti daerah yang Islamnya kuat distribusi pendapatan merata dibandingkan dengan tidak Islam. Berdasarkan penjelasan diatas, perlu kajian serta analisis tentang ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi NAD dan NTT dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Provinsi di Indonesia: Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2016**”.

LANDASAN TEORI

Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dapat dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu: distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000). Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Menurut (Lincoln Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang (NSB):

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah akan tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi suatu barang dan jasa.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah tertentu.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal *Capital Intensive*, sehingga menyebabkan persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran akan bertambah.
5. Rendahnya mobilitas social di suatu daerah.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

7. Memburuknya nilai tukar *term of trade* bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah aspek yang umum terjadi di dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan berbagai faktor yang terdapat di masing-masing daerah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan daerah juga menjadi berbeda. Menurut Myrdal (1957), dalam perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah (Manik, 2009:23) yaitu :

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti: minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batu bara yang cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Berbeda halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Kondisi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

2. Perbedaan Kondisi Demografi

Perbedaan kondisi demografi dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah dikarenakan hal ini akan mempengaruhi produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan persediaan lapangan kerja yang potensial dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang baik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah. kondisi demografi juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah transmigrasi atau migrasi spontan. Bila mobilitas barang tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi di suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar daerah akan cenderung meningkat, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Mobilitas barang dan jasa ini mengacu pada penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas di dalam suatu daerah, seperti : jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara dan lain-lain.

4. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah yang terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat naik. Apabila konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, pemerataan fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara. Ketiga, kondisi demografi juga turut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi

akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Alokasi dana bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan antardaerah cenderung meningkat. Akan tetapi sebaliknya bilamana sistem pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah akan cenderung lebih menurun. Keuntungan alokasi ditentukan dari biaya transport baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan penyewaan tanah. Oleh karena itu investasi akan lebih cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi NAD dan di provinsi NTT meliputi kabupaten/kota yang terdapat di provinsi NAD dan NTT. Dalam melihat ketimpangan pendapatan antar kabupaten di masing-masing provinsi penulis hanya membatasi terhadap pendapatan per kapita dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota setiap provinsi diukur tahun 2016. Data yang dilakukan di dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data pendapatan per kapita, dan Produk Domestik Regional Bruto yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi NAD dan NTT. Secara umum data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) nasional maupun daerah, buku-buku, jurnal penelitian, serta *browsing website internet* yang berkaitan dengan penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi yaitu antara provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2016. Analisis tingkat Ketimpangan Antar daerah yaitu menggunakan metode analisis: Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, dan Standar Deviasi. Analisis ini digunakan untuk melihat besaran ketimpangan pendapatan antar wilayah untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto di provinsi. Indeks ketimpangan tersebut dapat dibagi menjadi dua sub indikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional (Kuncoro, 2004).

Indeks Williamson

Indeks Williamson yang dikenal dalam tulisannya pada tahun 1965 merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Dalam metode ini diperoleh dari perhitungan per kapita dan jumlah penduduk di suatu negara/daerah. Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson sebagai berikut:

$$IW = \frac{2\sqrt{\sum((Y_i - Y)^2 \cdot f_i/n)}}{Y}$$

Dimana :

- IW : Indeks Williamson
- Y_i : PDRB per kapita di kabupaten i
- Y : PDRB per kapita Provinsi
- F_i : Jumlah penduduk di kabupaten i
- n : Jumlah penduduk provinsi

Besarnya Indeks Williamson ini akan bernilai Positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai Indeks ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai Indeks ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Kriteria untuk menetapkan dan mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ketimpangan itu tinggi, sedang ataupun rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut (BPS, Pemerataan pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk NAD dan NTT, 2000):

- a. Bila IW, < 0,3 artinya : ketimpangan ekonomi wilayah rendah
- b. Bila IW, 0,3 – 0,5, artinya ketimpangan ekonomi wilayah sedang
- c. Bila IW, > 0,5 artinya ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

Namun dalam analisis Indeks Williamson ini mempunyai kelemahannya yaitu penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global dan berapa besar bagian yang diterima oleh suatu kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas.

Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi. Adapun cara menghitung Indeks Entropi Theil dapat dilakukan dengan cara (Kuncoro,2004:134). Secara sistematis perhitungan Indeks Entropi Theil sebagai berikut:

$$I = \sum \left(\frac{Y_j}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_j/Y}{X_j/X} \right)$$

Dimana :

- I : Indeks Entropi Theil
- Y_j : PDRB per kapita kota/kabupaten j
- Y : PDRB per kapita Provinsi
- X_j : Jumlah penduduk kota/kabupaten j
- X : Jumlah penduduk provinsi

I = Mendekati 0, berarti ketimpangan semakin kecil (merata)

I = Mendekati 1, berarti ketimpangan semakin besar (tidak merata)

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai Indeks Entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai Indeks Entropi Theil maka semakin merata (umiyati, 2012). Indeks Entropi Theil digunakan untuk mengetahui Ketimpangan antar wilayah dan di dalam wilayah.

Standar Deviasi

Menurut Suhardi dan Purwanto (2009) Standar deviasi merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun, apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrem, standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi, sama halnya seperti mean. Standar Deviasi memiliki beberapa karakteristik khusus lainnya. Standar Deviasi tidak berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya di tambahkan atau dikurangkan dengan nilai konstan tertentu. Standar Deviasi berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya dikali/dibagi dengan nilai konstan tertentu (Sudjana, 1991). Bila dikalikan dengan nilai konstan, standar deviasi yang dihasilkan akan setara dengan hasil kali dari nilai standar deviasi aktual dengan konstan.

Rumus untuk menghitung Standar Deviasi sebagai berikut:

$$S = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}{n - 1}$$

Dimana :

- S : Standar Deviasi
- X_i : Nilai X
- \bar{X} : Rata-rata nilai X
- n : Ukuran sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten/Kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi, ketimpangan pendapatan yang dilihat dari PDRB per kapita antar kabupaten/kota, kemudian dianalisis menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.

Tabel 1.1
Indeks Williamson Dan Indeks Entropi Theil di Provinsi NAD dan NTT
Tahun 2016

Provinsi	Indeks Williamson	Indeks Entropi Theil
NAD	0.03905	1.3759
NTT	0.65019	1.4098

Sumber : Data BPS Provinsi Aceh dan NTT, Diolah

Pada tabel diatas menunjukkan angka ketimpangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota di provinsi NAD dan NTT tahun 2016 yaitu indeks williamson di provinsi NAD 0.03905, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi wilayah rendah (merata), dan di provinsi NTT 0.65019, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi wilayah tinggi atau distribusi pendapatan relatif tidak merata. Dilihat dari rendahnya tingkat ketimpangan di Provinsi NAD dikarenakan kemampuan pemerintah daerah

dalam mengembangkan potensi dan sektor ekonomi daerah, sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan. Selain itu, kemungkinan besar dengan diberlakukannya undang-undang mengenai Pelaksanaan Syariat Islam dimana menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dimana dalam Syariat Islam itu sendiri memiliki tujuan yaitu mengantarkan manusia kepada kesempurnaan spiritual dan rohani. Islam melarang monopoli, penimbunan harta dan perintah untuk mengeluarkan zakat dan sedekah, karena dengan begitu zakatnya lebih meningkat dan merata. Selain memakai Indeks Willamson juga dapat memakai Indeks Entropi Theil untuk mengetahui besarnya ketimpangan, dari hasil analisis Indeks Entropi Theil dimana di provinsi NAD sebesar 1.3759 dan di provinsi NTT sebesar 1.4098, namun di provinsi NTT mengalami disparitas lebih tinggi dari pada di provinsi NAD.

Tabel 1.2
Hasil Standar Deviasi di Provinsi NAD dan NTT Tahun 2016

Provinsi	Standar Deviasi Masing-Masing Variabel			
	N	Jumlah Penduduk	PDRB	Pendapatan Per Kapita
NAD	23	140703.551	3811293	15.01887072
NTT	22	102085.886	5707819	28.08048989

Sumber : Data Sekunder BPS, Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel yaitu untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 23 dan untuk provinsi Nusa tenggara Timur 22 yang berasal dari data BPS.

a. Jumlah Penduduk

Pada tabel diatas, variabel Jumlah Penduduk mempunyai nilai standar deviasi pada masing-masing provinsi, di provinsi NAD sebesar 140703.5512 dan di provinsi NTT sebesar 102085.886. hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi Jumlah Penduduk lebih kecil dari pada nilai standar deviasi pada PDRB di provinsi NAD sebesar 3811293 dan di provinsi NTT sebesar 5707819. Jika nilai standar deviasinya tinggi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, yang mengakibatkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa

Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap ketimpangan, akan tetapi pengaruhnya tidak besar terhadap ketimpangan.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tabel diatas, variabel PDRB mempunyai nilai standar deviasi di masing- masing provinsi, provinsi NAD sebesar 3811293 dan di provinsi NTT sebesar 5707819. hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi paling besar dari pada nilai standar deviasi pada Jumlah Penduduk dan Pendapatan Per Kapita. Jika nilai standar deviasinya tinggi maka penyimpangan yang sangat tinggi, dan menyebabkan bias. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh besar terhadap ketimpangan.

c. Pendapatan Per Kapita

Pada tabel diatas, variabel Pendapatan Per Kapita pada masing-masing provinsi mempunyai nilai standar deviasi di provinsi NAD sebesar 15.01887072 dan di provinsi NTT sebesar 28.08048989. hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai standar deviasi pada Jumlah Penduduk. Jika nilai standar deviasinya rendah maka penyimpangan kecil atau merata. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menunjukkan bahwa tertistribusi merata atau mendekati angka nol. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki banyak kandungan sumber daya alam seperti: Emas, Perak, Pabrik Semen Andalas, Pupuk AFF, minyak. Kontribusi besar daerah yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah dari sektor pertambangan dan penggalian kemudian disusul sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang kaya akan minyak, gas bumi, dan hasil tambang lainnya.

Disamping itu sektor pertanian dan perikanan juga memegang peranan yang signifikan. Perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam ditunjang oleh tiga industri besar yaitu Truman, Pasir Raja dan Labuhan Haji yang berada di Aceh selatan. Sektor perindustrian tidak terkonsentrasi di daerah kota saja melainkan sudah banyak di berbagai daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Didukung dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi yang akan mendorong peningkatan tingkat investasi

yang selanjutnya akan meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemungkinan dengan diberlakukannya undang-undang tentang Pelaksanaan Syariat Islam menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, dimana dalam sistem ekonomi Islam memiliki tujuan utamanya yaitu mengantarkan manusia kepada kesempurnaan ruhani dan spiritual. Dalam ajaran Islam itu sendiri dilarang untuk memonopoli, penimbunan harta dan perintah untuk mengeluarkan zakat dan sedekah yang sudah diatur di dalam Al-quran. Kemungkinan penerapan syariat islam juga berpengaruh, karena dengan begitu zakatnya lebih meningkat dan merata.

Prasarana jalan darat provinsi ini sepanjang 15.458,48 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 1.782,78 km dan jalan provinsi sepanjang 1.701,82 km. Untuk transportasi laut, terdapat 6 (enam) pelabuhan laut utama yaitu Sabang, Meulaboh, Lhokseumawe, Kuala Langsa, dan Malahayati yang sekaligus sebagai pelabuhan penyeberangan, pelabuhan penyeberangan yang lain adalah Pelabuhan Balohan. Provinsi ini juga memiliki Bandar udara yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kota Banda Aceh. Prasarana darat, laut maupun udara ini sangat membantu untuk menunjang kegiatan ekonomi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti halnya ekspor-impor ke luar atau pengiriman ke berbagai daerah.

Ketimpangan di provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa terdistribusi tidak merata (timpang) atau mendekati angka satu. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki banyak kandungan sumber daya alam seperti: semen kupang, mangan, minyak cendana. Kontribusi besar daerah yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dari sektor perikanan dan kelautan kemudian disusul sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang kaya akan keanekaragaman hasil laut, pertanian, perkebunan dan hasil tambang lainnya. Perekonomian Nusa Tenggara Timur ditunjang oleh sektor perikanan dan kelautan, akan tetapi perairan Nusa Tenggara Timur yang relatif terbuka dan pengawasan yang terbatas menyebabkan praktek penangkapan ikan secara illegal oleh kapal-kapal ikan dari negara lain. Penangkapan ikan yang menggunakan Bom, Potasium, dan racun sianida ikut memberikan andil terhadap tercemar dan rusaknya laut.

Pendistribusian dana alokasi hanya terpusat di daerah perkotaan saja, sehingga menyebabkan suatu daerah ketimpangannya cenderung tinggi. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sesungguhnya dengan sumber daya yang melimpah ini Nusa Tenggara Timur sangat potensial untuk menjadi kekuatan ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Kemungkinan keterbatasan sumber daya manusia dikawasan ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menggali potensi yang ada, sedangkan sumber daya alamnya sangat berpotensi tetapi pengelolaannya masih sangat kurang atau belum optimal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar provinsi di Indonesia: provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Nanggroe Aceh Darussalam kecil atau merata, karena di provinsi NAD sudah memberlakukan hukum syariat Islam. sementara dalam Islam juga wajib bagi umat muslim untuk menunaikan zakat, dimana Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antar satu orang dengan yang lain. Sebab dalam Islam, tujuan utama adalah mengantarkan manusia kepada kesempurnaan ruhani dan spiritual. Dalam sistem ekonomi Islam mekanisme yang dijalankan adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan itu. Di antara masalah terpenting yang mendapat perhatian dalam pandangan Islam adalah pembagian kekayaan secara adil di tengah masyarakat.
2. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Nusa Tenggara Timur berbanding terbalik dengan NAD, distribusi pendapatannya tidak merata atau timpang, disamping NTT tidak menerapkan hukum syariat Islam, ada faktor lain yaitu alokasi dana hanya terfokus pada suatu daerah saja, mobilitasnya yang kurang lancar, masih banyak sumber daya alam yang terbengkalai, keterbatasan kualitas sumber daya manusia perlu di berikan keterampilan atau skill, dan teknologi yang masih jauh tertinggal.

IMPLIKASI

Dari hasil penelitian ini bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat di implikasikan:

1. Pemerataan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi, jadi pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi dalam melaksanakan tahap-tahap untuk mencapai pembangunan yang merata. Sehingga pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta pencapaian yang diinginkan.
2. Pemerintah juga diharapkan mampu menetapkan regulasi yang unggul agar pemusatan industri tidak hanya terdapat pada wilayah-wilayah yang potensial. Dan juga turut membangun infrastruktur yang berguna bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan untuk menunjang distribusi pendapatan.
3. Pemerintah dapat melakukan pembekalan keterampilan kepada pekerja kasar yang memiliki penghasilan relatif kecil. Pembekalan keterampilan yang dilakukan, bertujuan agar pekerja memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan menekan angka ketimpangan yang tinggi.

Untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. Bagi Kabupaten/Kota yang masuk dalam daerah maju adalah memberikan bantuan bagi daerah yang tertinggal berupa pembiayaan program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak positif bagi pertumbuhan yaitu melalui peningkatan penyerapan ide dan inovasi teknologi yang maju dan kewirausahaan. Dengan hal ini, maka diharapkan masyarakat yang tinggal di daerah yang sudah maju dapat menularkan keterampilan atau skill yang dimiliki terhadap masyarakat di daerah tertinggal.
- b. Konsolidasi antar daerah atau kabupaten dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapainya dan

ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir. Sehingga otonomi daerah memberikan manfaat yang signifikan kepada seluruh masyarakat di dalamnya.

- c. Membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln (1997), *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudrajat (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta.
- Manik, Fitri R. (2009), “*Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kota Medan dengan Kabupaten Simalungun*”, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Myrdal, G. (1957), *Economic Theory and Under-development Regions*, London.
- Shankar, Shah (2008), *ketimpangan antar daerah*.
- Sudjana. (1991). *In Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharyadi, & Purwanto. (2009). *In Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, M. P. (1999), *Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah. ekonomi perencanaan dan pembangunan*. PT. raja grafindo pustaka, Jakarta.

Umiyati, E., 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 1(6), hal 42-50.